

PELAKSANAAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN LANGNGA KECAMATAN MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG

Hasniar^{1*}, Muhammadiyah², Anwar Parawangi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to describe and explain the implementation of the Family Planning Village in Langnga Village, Mattiro Sompe District, Pinrang Regency. The research used a qualitative descriptive method by conducting data collection techniques through observation and interviews. The results of this study showed that the standard and target aspects of the implementation of the KB village policy were quite good. This seen from the existence of the SOP in the form of a technical manual for the KB Village and the implementor's understanding of the standards and objectives of the policy itself. Communication aspects between organizations, communication to the community regarding the implementation had been running effectively, especially in terms of socialization, the characteristics of the executing agent, the bureaucratic structure of the division and authority and the character of the KB Village officers in its implementation was quite clear and good, it seen from bureaucratic structure and its officers the characteristics of a good policy implementing agent. and the Social, Political and Economic Environment, the response of the community and all parties in the implementation of the KB Village could run well and maximally. The indicators were not going well and had shortcomings include resources and the disposition or attitude of the implementers.

Keywords: *implementation, family planning village*

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan mendeskripsikan serta menjelaskan Pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai aspek standar dan sasaran kebijakan pelaksanaan Kampung KB sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya SOP berupa buku petunjuk teknis Kampung KB serta pemahaman implementor terhadap standar dan sasaran kebijakan itu sendiri. Aspek komunikasi Antar Organisasi komunikasi kepada masyarakat terhadap implementasi sudah berjalan secara efektif khususnya dalam hal sosialisasi, Karakteristik Agen Pelaksana struktur birokrasi pembagian dan wewenang serta karakter petugas Kampung KB dala pelaksanaannya sudah cukup jelas dan baik hal ini dapat dilihat dari struktur birokrasinya yang jelas dan petugasnya yang memiliki karakteristik agen pelaksana sebuah kebijakan yang baik. dan Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi respon masyarakat dan segala pihak dalam pelaksanaan Kampung KB tersebut dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Adapun indikator yang tidak berjalan dengan baik serta memiliki kekurangan diantaranya sumber daya dan disposisi atau sikap para pelaksana.

Kata kunci: pelaksanaan, kampung keluarga berencana

* hasniar@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyatakan bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diperlukan adanya penetapan pada Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas hidup yang mencakup semua aspek kehidupan yang berhubungan dengan kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Bukan hanya untuk golongan tertentu saja, tetapi kemakmuran dan kesejahteraan untuk semua golongan. Peningkatan kualitas hidup masyarakat diantaranya dapat diwujudkan dengan pelaksanaan program KB.

Dalam petunjuk teknis Kampung KB yang dituliskan BKKBN, arti dari Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu

dimana terdapat keterpaduan antara program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Tujuan utama dari adanya Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam masyarakat ditingkat desa melalui program kependudukan, keluarga berencana serta pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan suatu keluarga kecil yang berkualitas tinggi. Selain itu, Kampung KB juga meningkatkan partisipasi masyarakat, serta pemerintahan mengenai program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan kependudukan, kesehatan serta hak-hak reproduksi, menciptakan ketahanan keluarga dengan cara program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung serta meningkatkan taraf kehidupan dan kualitas masyarakat pada wilayah Kampung KB melalui berbagai kegiatan lintas sektor lain yang disesuaikan

dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Dalam rangka integrasi Kampung Keluarga Berencana (KB). Kampung KB merupakan miniatur suatu program pemerintah yang dilaksanakan secara utuh, baik masalah kependudukan, KB dan pembangunan yang disinergikan dengan pembangunan lintas sektor lain. Kampung KB di Kelurahan Langnga sudah dilaksanakan sejak tahun 2017, maka BKKBN menetapkan Kecamatan Mattiro Sompe sebagai salah satu perwujudan Kampung KB tepatnya di Kelurahan Langnga. Kelurahan Langnga terpilih dalam kategori yang tepat sebagai daerah yang menjadi contoh dalam pelaksanaan Kampung KB dikarenakan Kampung KB di Kelurahan Langnga merupakan wilayah pinggiran dengan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam ber-KB yang rendah dikarenakan minimnya pengetahuan akan pentingnya ber-KB.

Namun fenomena yang terjadi adalah program ini belum berjalan sesuai dengan harapan, banyak masyarakat yang tidak mengetahui manfaat Kampung KB, kemudian hambatannya adalah kegiatannya tidak berjalan dengan lancar akibat covid-19.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI). Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb). Pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan biasa diartikan penerapan. Majoe dan wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Menurut Wahab (2001). Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Harsono (2002) mengungkapkan pelaksanaan atau implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Pengertian implementasi yang dikemukakan menurut Harsono dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi terciptanya tujuan yang

baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyampaian akhir. Oleh karena itu suatu pelaksanaan baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan.

Secara sederhana pelaksana bisa diartikan suatu proses yang menyeluruh untuk mencapai sasaran atau target yang sudah direncanakan didalam suatu organisasi. Pelaksanaan merupakan rangkaian kegiatan atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirancang dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan seperti, alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan kegiatan, dimana tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.

Dalam proses implementasi terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan, unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelola pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Keberhasilan implementasi menurut Van Metter dan Van Horn (1975) terdapat enam variabel yaitu:

Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran, dasar dan sasaran-sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen. Akan tetapi, dalam beberapa hal ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan harus dideduksikan oleh peneliti perorangan. Pada akhirnya, pilihan ukuran-ukuran pencapaian bergantung pada tujuan-tujuan yang dilakukan oleh penelitian.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika

kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan adalah sumberdaya finansial dan sumberdaya fasilitas

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van meter dan Van Horn (1975), maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Stuktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut dan begitupun sebaliknya. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) ada beberapa alasan mengapa tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggungjawab terhadap

implementasi kebijakan tersebut, yakni: tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaab akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya. Dalam hubungan-hubungan antarorganisasi maupun antar pemerintah, dua tipe kegiatan pelaksanaan merupakan hal yang penting yaitu nasihat dan bantuan teknis, atasan dapat menyadarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan

Van Horn (1975) adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

METODE PENELITIAN

Jenis dan tipe penelitian ini adalah Kualitatif dengan memanfaatkan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan memahami permasalahan yang sedang terjadi atau dialami objek penelitian. dengan menggunakan macam metode ilmiah seperti interview, observasi, serta pengamatan dokumen. Menggunakan tipe deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yaitu tentang Pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

Peneliti menentukan informan penelitian dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, dengan mengambil informan secara sengaja, jumlah informan yakni sebanyak 8 orang.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun Teknik pengabsahan data yang digunakan yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langnga adalah sebuah kelurahan dan merupakan ibukota dari Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Kelurahan Langnga terbagi atas dua dusun/lingkungan yaitu lingkungan Langnga dan lingkungan Birittasi. Kelurahan Langnga terletak pada 3,8436 LS dan 119,5211 BT dan berjarak sekitar 190 km dari kota Makassar. Kelurahan Langnga memiliki batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara Desa Mattombong, Sebelah Timur Kecamatan Lanrisang, Sebelah Selatan Selat Makassar, Sebelah Barat Kelurahan Pallameang. Jumlah penduduk Kelurahan Langnga 5.160 jiwa jenis kelamin laki-laki 2.490 jiwa dan jenis kelamin perempuan 2.670 jiwa.

Mata pencaharian Masyarakat Kelurahan Langnga petani 1.809 jiwa, nelayan 807 jiwa, PNS 58 jiwa,

TNI/POLRI 22 jiwa, swasta 650 jiwa, pengusaha dan pedagang 711 jiwa, tukang 150 jiwa, sopir 21 jiwa, tidak bekerja 917 jiwa.

Pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Langnga dapat di deskripsikan sebagai suatu elemen penyelenggara atau pengelola pemerintahan setingkat desa yang dibentuk demi kepentingan bersama dan tujuan yang ingin dicapai.

Dengan demikian, pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Langnga mulai dari perancangan, pembahasan dan tempat terlaksananya kegiatan maupun pelatihan yang akan dilaksanakan telah berjalan dengan baik.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang diperoleh dari Lurah Kelurahan Langnga yang mengatakan bahwa: Kampung Keluarga Berencana merupakan kampung percontohan tempat dimana warga masyarakat kelurahan Langnga bisa mengembangkan potensi-potensi terpendam yang dimiliki selama ini. Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Langnga sudah berjalan dengan baik karena program ini didukung oleh berbagai pihak seperti penyuluh, lurah, kelapa lingkungan, dan kelompok-kelompok pemberdayaan dan warga masyarakat sekitar. Akan tetapi

Kampung Keluarga Berencana ini masih belum memiliki fasilitas yang memadai.

Kampung KB Minangkabau adalah salah satu Kampung KB yang berada di Kelurahan Langnga yang dibentuk sejak 30 Agustus 2017 dengan Peraturan Daerah Pinrang Nomor 55 Tahun 2009 tentang kependudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas penegndalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jumlah KK 202 jiwa dengan rincian KK laki-laki 175 dan KK perempuan 27 jumlah penduduk 662 berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki 326 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 336 jiwa.

Jumlah PUS 101 jumlah peserta KB aktif 70. IUD 12, MOW 7, MOP 0, KONDOM 5, IMPLANT 9, SUNTIKAN 32, dan PIL 5. PUS yang tidak ikut KB berjumlah 23. Hamil 32, IAS (Ingin Anak Segera) 19, IAT (Ingin Anak di Tunda) 2, TIAL (Tidak Ingin Anak Lagi) 0.

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator ukuran implementasi menurut Donalds S. Van

Meter dan Van Horn. Menurutnya ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

Standar Dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan sesuatu yang harus diterapkan dalam sebuah kebijakan. Standar dan sasaran harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Ketika standar dan sasaran kebijakan terlalu ideal maka akan sulit direalisasikan. Standar dan sasaran kebijakan tersebut juga harus dipahami dengan baik oleh para pelaksana-pelaksana kebijakan (*implementors*).

Standar dan sasaran program meliputi mekanisme Prosedur (Standard Operational Procedures), yang dalam hal ini mengenai program dilakukan oleh para dinas PPKBD, PLKB Kecamatan Mattiro Sompe, serta para Kader Kampung KB. SOP sendiri digunakan sebagai acuan langkah-langkah atau tahapan dari tindakan yang akan diambil selama proses pelaksanaan dari suatu kegiatan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, SOP dari Kampung KB di Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe sudah cukup baik, SOP yang digunakan berupa buku petunjuk teknis

Pelaksanaan Kampung KB, mulai dari awal kegiatan hingga tahap akhir yaitu evaluasi program semua mengikuti buku petunjuk teknis tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Namun dilihat dari hasil wawancara penelitian tersebut bahwa para petugas Kampung KB memahami sasaran dan tujuan serta berkompeten dalam melaksanakan Program Kampung KB di Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe. Jadi dapat dikatakan standar dan sasaran implementasi program Kampung KB sudah cukup baik dan jelas.

Sumber Daya

Dalam mengimplementasikan kebijakan Kampung KB, ketersediaan sumber daya merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Tanpa tersedianya sumber daya sangat kecil kemungkinan kebijakan Kampung KB di Kelurahan Langnga dapat diimplementasikan dengan baik. Sumber daya memiliki tiga sub indikator didalamnya yang digunakan dalam mendukung keberhasilan

pelaksanaan program Kampung KB, diantaranya yaitu: Sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dalam menunjang keberhasilan dari suatu program. Program Kampung KB sudah dikomunikasikan dengan baik dan jelas namun jika implementor kurang sumberdaya maka untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting keberhasilan dari suatu program. Dalam kegiatan Kampung KB di Kelurahan Langnga untuk sumber daya manusianya tidak memiliki kekurangan. Hal ini seperti dijelaskan oleh Pak Nur Pulangi selaku PLKB Kecamatan Mattiro Somepe bahwa petugas Kampung KB cukup banyak terdiri dari 1 orang Kepala Kampung KB dan 8 sub. Selain itu dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kader dan BIDES serta dari perangkat desa sudah mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan Kampung KB tersebut.

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang melibatkan persoalan tentang dana atau modal awal yang memang sudah direncanakan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu yang nantinya akan

dialokasikan dalam suatu kegiatan. Sumber Dana yaitu menggunakan Dana Desa, APBD dan APBN.

Sumber daya fasilitas disini memiliki peran penting dalam mendukung serta menunjang berjalannya Program Kampung KB. fasilitas atau sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam mendukung proses pelaksanaan kegiatan Kampung KB ini adalah salah satunya tempat. Tempat yang dipergunakan selama kegiatan Kampung KB berlangsung yaitu bertempat pada rumah warga atau kantor Kelurahan Langnga.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terkait anggaran yang dipergunakan sudah mampu mencukupi untuk menutupi kebutuhan dana yang ada selama proses Kampung KB berjalan. Namun, sumber daya fasilitas Kampung KB di Kelurahan Langnga belum mempunyai fasilitas dalam menunjang keberhasilan Kampung KB tersebut. Jadi dapat dikatakan dari segi sumber daya fasilitas belum memadai dengan baik.

Karakteristik Agen Pelaksana

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan karakteristik yang baik dari para agen pelaksana kebijakan tersebut. Karakteristik tersebut mencakup struktur birokrasi,

norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

Struktur birokrasi Kampung KB yaitu Standard Operasional Prosedur (SOP). SOP sendiri digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu program. SOP yang digunakan yaitu berupa buku petunjuk teknis pelaksanaan Kampung KB. Sedangkan struktur organisasi Kampung KB terdiri dari Pelindung/Penanggung yaitu Kepala Kelurahan, penasehat yaitu LKK, Ketua TP, PKK, PLKB.

Norma yang berlaku dalam Pelaksanaan Kampung KB pun tidak ada yang tertulis, hanya berupa bentuk kewajiban petugas melaksanakan kegiatan dengan baik. Sementara itu untuk pembagian tugas dan wewenang yang telah diberikan juga dijalankan dengan sesuai prosedur yang ada. Pelaksanaan dari PLKB Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe, serta para kader Kampung KB sudah melaksanakan tugas mereka masing-masing sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Kampung KB.

Karakter petugas Kampung KB yang ramah dan rajin bersilaturahmi kepada masyarakat juga mencerminkan memiliki karakteristik yang baik sebagai agen pelaksana sebuah kebijakan dalam mempengaruhi implementasi suatu program.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat struktur birokrasi pembagian dan wewenang serta karakter petugas Kampung KB dalam pelaksanaannya sudah cukup jelas dan baik.

Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana

Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana mencakup tiga hal yang sangat penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempeoleh kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Kedua; kognisi yakni pelaksanaannya terhadap kebijakan. Ketiga; intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa respon yang diberikan oleh para implementor yaitu PLKB dan juga kader didalam kegiatan Kampung KB di Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe ini dipaparkan oleh bapak Nur Pulangi selaku Ketua PLKB, beliau mengatakan bahwa dari pihak implementor sendiri menerima sangat baik dengan adanya program Kampung KB ini, menurut beliau dengan adanya Kampung KB ini nantinya akan mensejahterakan masyarakat Kelurahan Langnga tersebut, dan jika program ini berhasil maka hal tersebut juga menjadi suatu

kebanggaan tersendiri bagi pihak-pihak yang terlibat dalam program Kampung KB ini.

Menurut masyarakat para petugas sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya menjalankan program Kampung KB. Mereka sangat memahami program tersebut dan apa yang harus mereka lakukan. Mereka juga mengerti kebutuhan masyarakat dan juga rajin melakukan kegiatan penyuluhan serta bersosialisasi dengan masyarakat. Intensitas petugas dalam melaksanakan kegiatan akhir-akhir ini terhambat dikarenakan covid-19 sehingga masyarakat Kampung KB yang ikut dalam melaksanakan suatu kegiatan ini dibatasi hanya ada beberapa orang saja yang bisa mengikuti kegiatan tersebut.

Masalah yang dihadapi selanjutnya adalah belum maksimalnya kebutuhan dan kesadaran ber KB, dan kesertaan ber-KB pria sangat rendah, masih banyaknya anak yang putus sekolah, narkoba serta pernikahan usia dini dan partisipasi masyarakat yang mulai berkurang dikarenakan adanya covid-19 dan juga memiliki kesibukan dan kepentingan masing-masing menjadikan masalah ini begitu kompleks sehingga petugas kesulitan dalam menangani dan membutuhkan

waktu untuk melakukan sebuah perubahan perbaikan.

Melihat dari segi insentif yang telah diterima dan diberikan, diperlukan adanya insentif yang cukup layak diberikan kepada pelaksana kegiatan. Insentif sendiri merupakan bentuk menghargai dengan apa yang telah dilakukan. Insentif didalam kegiatan Kampung KB di Kelurahan Langnga sendiri sudah cukup baik. Insentif yang diterima oleh PLKB berasal dari gaji perbulan mereka.

Dihat dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa disposisi atau sikap para pelaksana belum baik karena masih ada masalah yang menjadi kendala para implementor.

Komunikasi Antar Organisasi

Sebelum suatu kebijakan diimplementasikan pelaksana kebijakan harus menyadari bahwa suatu keputusan yang telah dibuat dan perintah untuk melaksanakannya telah dikeluarkan, sehingga mereka bekerja dengan memiliki wewenang masing-masing. Disini peran komunikasi sangat penting untuk mensinergikan setiap aktivitas. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi yang akurat, jelas dan konsisten dan menyeluruh

serta koordinasi antara instansi-instansi yang terkait dalam proses implementasi.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti telah menganalisa terkait dengan komunikasi yang telah disampaikan terkait dengan program Kampung KB di Kelurahan Langnga oleh pihak BKKBN Kabupaten Pinrang dan Dinas PPKBD Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan dan berupaya sebaik mungkin dalam penyampaian informasi dari program tersebut. Penyampaian informasi berupa sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan bertujuan agar para pihak yang terkait atau implementor Kampung KB dapat secara cermat mengetahui, memahami apa yang terjadi tujuan, manfaat, prosedur pelaksanaan, dan juga sasaran dari program tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi dalam pelaksanaan Kampung KB telah berjalan dengan cukup baik.

Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi

Dalam pengimplementasian suatu kebijakan perlu adanya dukungan positif dari setiap kondisi yang ada, baik kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat yang berada di Kelurahan Langnga dapat diketahui bahwa kebijakan program Kampung KB ini mendapat dukungan dari masyarakat dapat dilihat dari cukup banyaknya masyarakat yang mengharapkan program ini dapat terus ditingkatkan dan berlanjut, karena manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan Kampung KB sudah memberikan pengaruh terhadap pengetahuan masyarakat Kelurahan Langnga. Begitu juga dengan para elit politik yang berperan langsung dalam mendukung pelaksanaan program Kampung KB ini.

Melihat keadaan tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan Kampung KB di Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe sudah mendapat dukungan yang baik dari masyarakat maupun segala pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Standar dan sasaran kebijakan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakana Pelaksanaan Kampung KB sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya SOP (*Standard Operational Procedurs*) berupa buku petunjuk teknis

Kampung KB serta pemahaman implementor terhadap standar dan sasaran kebijakan itu sendiri, (2) sumber daya manusia dan anggaran dalam Pelaksanaan Kampung KB sudah memadai, namun dari segi fasilitas belum memadai dikarenakan fasilitasnya belum ada hanya ada pembinaan yang dilakukan kepada implementor, (3) karakteristik Agen pelaksana struktur birokrasi pembagian dan wewenang serta karakter petugas Kampung KB dalam pelaksanaannya sudah cukup jelas dan baik hal ini dapat dilihat dari struktur birokrasinya yang jelas dan petugasnya yang memiliki karakteristik agen pelaksana sebuah kebijakan yang baik, (4) Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana Respon dan pemahaman implementor akan program Kampung KB cukup baik hal ini terlihat dari keinginan implementor untuk melakukan program KB ini dengan baik. Insentif implementor yang diberikan pun juga dapat dikatakan cukup. Hanya konsistensi kegiatan juga tidak berjalan dengan lancar dan juga terjadi hambatan karena adanya covid-19, (5) komunikasi Antar Organisasi terhadap implementasi sudah berjalan secara efektif khususnya dalam hal sosialisasi, (6) lingkungan sosial, ekonomi dan Politik Respon masyarakat dan segala pihak dalam

pelaksanaan Kampung KB sangat baik serta mendukung pelaksanaan Kampung KB tersebut dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter. 1975. *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*. Yogyakarta
- Hidayah1, Seventina Nurul. 2018. *Implementasi Program Kampung KB Sebagai Inovasi Strategis Pencegahan 4t (4 Terlalu) Dalam Kehamilan Di Rw 10 Margadana, Tegal*
- Listyawardan, Dwi. 2017. *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman Bagi Pengelola Kampung KB Di Lini Lapangan)*
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Peraturan Daerah Pinrang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.